



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDIRO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **719232**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 881 m2/325 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 1.676 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 1.979 m2 di KAB / KOTA BLORA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 155.000.000
4. Tanah Seluas 3.029 m2 di KAB / KOTA BLORA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 85.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 637 m2/240 m2 di KAB / KOTA BLORA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 105.000.000
6. Tanah Seluas 3.087 m2 di KAB / KOTA BLORA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 1.388 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
8. Tanah Seluas 1.495 m2 di KAB / KOTA BLORA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **93.000.000**

1. MOTOR, HONDA VERZA GL15B1DF MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



2. MOTOR, HONDA NF125D/ KHARISMA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOBIL, DATSUN DATSUN GO PANCA T 1,2 MT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. MOTOR, HONDA GENIO C1M02N42LO/SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, YAMAHA N-MAX B6H A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.542.219
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.077.542.219
III. HUTANG	Rp.	50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.027.542.219

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.